

# Usaha Membangun Keluarga Sakinah oleh Perempuan Kepala Keluarga di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi

**Joko Tri Haryanto**

Balai Litbang Agama Semarang

Email : jejakagama@yahoo.co.id

diterima redaksi 3 April 2013

## **Abstract**

*In general, a family consists of husband or father, wife or mother, and children who each have different roles and functions within the institution of family. Internal affairs of the household, especially educating children, managing household matters, and providing meals are a wife's common tasks, while working as a breadwinner is a husband's responsibility. However, the social facts show there are families which have female heads of household because of certain reasons. This study applies a qualitative approach to examine women as heads of household in Tembokrejo Village, Muncar Subdistrict, Banyuwangi, East Java, as an effort to build "sakinah" families. The findings suggest that female heads of household (Pekka) get a double burden in their families, such as carrying out the production function to generate income and support families' economy, as well as the functions of education, affection, care, and protection. Pekka play their roles to build "sakinah" families by coping with the crisis as the impact of being left by their husbands for some certain reasons, solving economic problems, performing educational functions, and finally social interaction. The role of the government and the religious institutions are less able to protect and care about families headed by Pekka especially the poor ones. Protection and care for the families are realized by, among of them, providing guarantees to those families to obtain their basic rights, especially the economic ones.*

**Keywords:** Widows, female heads of household (Pekka), "Sakinah" Family

## **Abstrak**

*Secara umum suatu keluarga terdiri atas suami atau bapak, istri atau ibu, dan anak yang masing-masing memiliki peran dan fungsinya yang berbeda dalam institusi keluarga. Domain urusan internal rumah tangga, terutama mendidik anak, mengelola rumah tangga dan menyediakan makan menjadi tugas isteri; sedangkan bekerja sebagai pencari nafkah menjadi tugas suami. Namun fakta di masyarakat menunjukkan ada keluarga-keluarga yang peran kepala keluarga dipegang oleh perempuan karena sebab-sebab tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perempuan sebagai kepala keluarga di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi Jawa Timur dalam upaya membangun keluarga sakinah. Hasil temuan menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga (Pekka) mendapatkan beban ganda dalam keluarga, yaitu menjalankan fungsi produksi untuk menghasilkan pendapatan dan ekonomi keluarga, sekaligus juga menjalankan fungsi pendidikan, afeksi, pemeliharaan, dan perlindungan. Pekka memerankan diri untuk membangun keluarga sakinah dengan cara mengatasi krisis sebagai dampak ditinggal oleh suami karena sebab tertentu, mengatasi masalah ekonomi, melaksanakan fungsi pendidikan, dan melakukan interaksi sosial. Peran pemerintah dan institusi keagamaan kurang mampu melindungi dan memperhatikan nasib keluarga yang dipimpin oleh Pekka terutama keluarga miskin. Bentuk perlindungan dan perhatian bagi keluarga yang dipimpin Pekka diantaranya jaminanpada keluarga tersebut untuk memperoleh hak-hak dasarnya terutama ekonomi.*

**Kata Kunci :** Janda, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Keluarga Sakinah

## Pendahuluan

### *Latar Belakang*

Institusi keluarga secara umum di masyarakat melakukan pembagian kerja antarjenis kelamin, yakni antara laki-laki dan perempuan, yakni antara ibu dan ayah atau antara suami dan isteri. Dalam masyarakat sudah lazim, bahwa domain urusan internal rumah tangga, terutama mendidik anak, mengelola rumah tangga dan menyediakan makan menjadi tugas isteri; sedangkan bekerja sebagai pencari nafkah menjadi tugas suami. Regulasi negara, semisal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal Pasal 21 ayat (3) juga menyebutkan, *suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga*. Dengan kata lain, tugas perempuan dipandang lebih banyak pada ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik dan produktif.

Namun dalam kenyataan sosial, di masyarakat ada kondisi-kondisi tertentu di mana sebuah keluarga tidak berjalan sebagaimana dalam pandangan umum maupun regulasi di atas. Ada situasi yang mendorong, bahkan memaksa perempuan atau istri untuk menggantikan suami sebagai kepala keluarga. Tahun 2010, Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan terdapat 65 juta keluarga di Indonesia, di mana dari keluarga-keluarga tersebut, 14% (9 juta)-nya dikepalai oleh perempuan. Padahal data SUSENAS tahun 2007 menunjukkan jumlah perempuan yang (terpaksa) menjadi kepala keluarga, adalah mencapai 13,60 % dari populasi keluarga. Angka ini pun menunjukkan peningkatan dari tahun 2001 kurang dari 13% menurut data PEKKA (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga yang dirintis oleh Komnas perempuan). Dengan demikian terjadi kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% per tahun (PEKKA, 2010).

Dalam kondisi si isteri menjadi kepala keluarga ini, berarti sang isteri memiliki peran ganda, yakni mengatur kelangsungan rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena tanggungjawabnya, perempuan kepala keluarga tersebut biasanya bekerja ekstra. Dampak terburuk adalah keterlantaran anak-anak dari segi pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Keadaan ini semakin diperparah oleh karena kondisi perempuan yang menjadi kepala keluarga berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Data dasar Sekretariat Nasional PEKKA di 8 provinsi menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga umumnya berusia antara 20 – 60 tahun, lebih dari 38.8% buta huruf dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar sekalipun. Mereka menghidupi antara 1-6 orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp 10,000 per hari. Sebagian mereka mengalami trauma karena tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun negara (PEKKA, 2010).

Di antara penyebab perempuan menjadi kepala keluarga adalah kematian suami dan perceraian. Salah satu wilayah yang memiliki angka perceraian sangat mencolok adalah Kabupaten Banyuwangi. Tanpa menafikan penyebab lain, faktor perceraian cukup signifikan menyebabkan perempuan mengambil alih peran kepala keluarga. Berdasarkan data Pengadilan Agama Banyuwangi, dalam tahun 2010 perkara perceraian yang diputus berjumlah 5.505 perkara yang meliputi 2.082 perkara cerai talak dan 3.423 perkara cerai gugat. Angka tersebut menempatkan Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten dengan kasus perceraian terbesar di Indonesia.

Tulisan ini mengungkapkan upaya-upaya perempuan kepala keluarga (PEKKA) di Desa Tembokrejo

Kecamatan Muncar Banyuwangi Jawa Timur. Kecamatan Muncar menurut data Pengadilan Tinggi Agama Banyuwangi merupakan wilayah yang paling tinggi angka perceraianya. Tulisan ini memberi informasi mengenai persoalan riil, kendala-kendala, bahkan strategi adaptasi maupun resistensi perempuan dalam menyikapi situasi keluarga yang menjadi tanggungjawabnya.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi perempuan kepala keluarga (Pekka) di wilayah Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi?
2. Bagaimana perempuan kepala keluarga (Pekka) di wilayah Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam keluarga?
3. Bagaimana dukungan lingkungan terhadap perempuan kepala keluarga (Pekka) di wilayah Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi dalam membangun keluarga sakinah?

### Kerangka Konseptual

Definisi BPS tentang kepala keluarga menciptakan dua kualifikasi orang yang dapat disebut sebagai kepala keluarga yakni: (i) orang yang dalam kenyataannya bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari dalam sebuah rumah tangga atau (ii) orang yang dianggap sebagai kepala keluarga. Berdasarkan definisi tersebut, maka perempuan kepala rumah tangga didefinisikan sebagai perempuan yang dianggap bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, yaitu (1) perempuan tidak kawin yaitu perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, (2) perempuan kawin

yaitu perempuan yang terikat dalam perkawinan tetapi tempat tinggalnya terpisah dengan suami sehingga perempuan tersebut mengepalai rumah tangganya, (3) perempuan cerai hidup atau cerai mati dan belum menikah lagi dan tidak kembali ke keluarga asal atau mertua (Harini & Listyaningsih, 2001).

Adapun menurut Seknas PEKKA (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), yang termasuk perempuan kepala keluarga yang menjadi subjek dampungannya adalah Perempuan miskin yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, dan pengambil keputusan dalam keluarga yang mencakup:

1. Perempuan yang ditinggal/dicerai hidup
2. Perempuan yang suaminya meninggal dunia
3. Perempuan yang membujang atau tidak menikah
4. Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga
5. Perempuan bersuami, tetapi tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin karena suaminya bepergian lebih dari satu tahun.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan,

ketaqwaan dan akhlak mulia.

Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa dalam menjalankan tugas-tugas sosialnya. Keluarga sakinah tidak hanya memiliki keseimbangan danan peran-peran domestik dan sosial (khilafah), tetapi terpenting keseimbangan dalam mewujudkan fungsinya sebagai hamba Allah (vertikal). Dengan demikian, keluarga sakinah adalah keluarga yang memperoleh ketentraman lahir dan batin, sejahtera duniawi dan ukhrowi, dan akhirnya menjadikan seluruh rangkaian kehidupannya sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. (Lubis, 2005: 147)

### Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui model penelitian kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2011, di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Lokus penelitian ini adalah Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan data merupakan wilayah dengan angka perceraian paling tinggi di Banyuwangi. Fokus penelitian ini adalah keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang oleh karena suatu sebab dipimpin oleh seorang perempuan sebagai kepala keluarga. Keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga ini dibatasi pada keluarga yang memeluk agama Islam. Keluarga tersebut secara ekonomi masuk kategori miskin (sejahtera 1 dan pra-sejahtera).

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, FGD (*Focus Group Discussion*), dan telaah dokumen. Obsevasi dilakukan untuk mengamati secara langsung perikehidupan keluarga yang dipimpin oleh perempuan kepala keluarga dalam menjalankan fungsinya. Wawancara

mendalam untuk menggali penjelasan-penjelasan terhadap perilaku subyek pengamatan, situasi kognitif dan afektif pelaku terlibat, baik perempuan kepala keluarga tersebut, anggota keluarga, tetangga, tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait konteks perempuan sebagai kepala keluarga yang menjalankan fungsi keluarga. *Focus Group Discussion* (FGD) difasilitasi oleh KUA Muncar menghadirkan peserta dari penghulu, penyuluh PNS, penyuluh non-PNS/P3N (Pembantu Petugas Pencatat Nikah), MUI Kecamatan Muncar, Ketua Ormas perempuan Kecamatan Muncar, dan kepala desa perempuan. FGD ini untuk mengidentifikasi persoalan perempuan menjadi kepala keluarga, faktor pendukung dan penghambat perempuan kepala keluarga dalam membangun keluarga sakinah, dan program pemerintah setempat bagi perempuan kepala keluarga di lingkungan Kecamatan Muncar. Adapun telaah dokumen dan pustaka digunakan untuk melengkapi data-data primer dengan data sekunder berupa dokumentasi maupun telaah pustaka terkait dengan setting masyarakat dan budaya yang melingkupi keluarga yang menjadi sasaran penelitian ini.

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan pendekatan fungsionalisme struktural, dan perspektif keluarga sakinah. Dengan demikian hasil penelitian ini akan memiliki nilai signifikansi dengan kepentingan Kementerian Agama dalam penyusunan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan keluarga sakinah.

### Temuan Penelitian dan Pembahasan

#### *Setting Lokasi*

Desa Tembokrejo pada bagian baratnya merupakan daerah pertanian yang subur, tetapi ke arah timur langsung bersentuhan dengan Pesisir laut yakni pantai Muncar. Wilayah Muncar

terkenal pula sebagai daerah penghasil ikan, terbesar kedua di Indonesia setelah Bagan Siapi-api. Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi menyebutkan jumlah nelayan di Muncar 10.707 orang dari keseluruhan jumlah nelayan di Banyuwangi, yang berjumlah 18.839 orang. Hasil ikan inipun mendorong munculnya industri, terutama industri pengolahan hasil laut, yang meliputi industri pengalengan ikan, industri pakan ternak, industri minyak ikan, industri tepung ikan, coolstorage dan lain-lain.

Penduduk Desa Tembokrejo berjumlah 27.965 jiwa yang terdiri dari 13.811 laki-laki dan 14.154 perempuan. Mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, yakni 7.581 orang. Adapun bidang pertanian, terdapat 2.249 petani yang terdiri dari 560 petani pemilik tanah, 312 petani penggarap tanah, dan 1.377 buruh tani.

Masyarakat di Tembokrejo, sebagaimana keluarga Jawa pada umumnya merupakan keluarga setara, dalam pengertian masing-masing, baik suami maupun istri dianggap cakap bertindak; yang dalam kesatuan kerabat disebut *somah seperjodohan* atau *brayat mandiri*. Istri dalam keluarga Jawa pada umumnya juga mampu untuk bekerja mendampingi suami. (Sajogyo, 1985: 32-33) Di Tembokrejo, istri-istri umumnya juga bekerja sesuai dengan kondisinya masing-masing. Suami bekerja menjadi nelayan, istri selain mengurus rumah tangga juga turut dalam pengolahan hasil ikan untuk dijual, ataupun bekerja di warung, pabrik, dan sebagainya. Demikian pula di lingkungan pertanian, umumnya perempuan juga turut terjun ke sawah.

Masyarakat di Tembokrejo, kecamatan Muncar mayoritas memeluk agama Islam, dan bahkan Islam adalah agama yang secara umum dianut oleh masyarakat di wilayah kabupaten

Banyuwangi, yakni 96,85% di tingkat desa Tembokrejo, 95,17% di tingkat kecamatan Muncar, dan 95,34% di tingkat kabupaten Banyuwangi. Hal ini menyebabkan tradisi dan ajaran Islam menjadi landasan perilaku dan norma umum bagi masyarakat di Tembokrejo dan sekitarnya. Terlebih lagi situasi ini semakin didukung dengan banyaknya pondok pesantren di Kecamatan Muncar. Pesantren di Kecamatan Muncar berjumlah 22 pesantren, dengan ratusan santri. Kebanyakan santri adalah santri mukim yang berasal dari luar Banyuwangi. Di Tembokrejo sendiri terdapat tiga pondok pesantren dengan jumlah kiai 12 orang dan santrinya 225 orang.

Mayoritas warga berafiliasi ormas Nahdlatul Ulama (NU) yang masih memelihara tradisi-tradisi keagamaan seperti majelis taklim yang rutin mingguan dengan kegiatan seperti Yasinan, Tahlilalan, Barzanzi dan sebagainya. Tradisi-tradisi tersebut menjadi bagian dari masyarakat Muncar, tidak terbatas warga Nahdliyin saja, tetapi warga Muhammadiyah pun turut serta dalam kegiatan tradisi keagamaan tersebut. Berbagai kegiatan ini menjadi ruang interaksi keberagaman yang erat antarwarga.

### **Deskripsi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)**

Perempuan kepala keluarga (Pekka) di Tembokrejo pada umumnya disebabkan karena suaminya meninggal dunia, dan perceraian. Sebab-sebab lain perempuan mengambil alih kepemimpinan dalam keluarga disebabkan oleh karena ketidakmampuan suami, dan ada juga suami istri berpisah tetapi tanpa status perceraian, karena mereka tidak memprosesnya melalui pengadilan agama. Pada akhirnya, perempuanlah yang memegang peranan sebagai kepala keluarga setelah si suami

pergi.

Perempuan yang menjadi kepala keluarga akibat ditinggal mati suami, atau “rondo tinggal mati”, pada umumnya karena sakit. Berdasarkan data dari pemerintah desa Tembokrejo, dalam tahun 2010 peristiwa kematian yang dilaporkan berjumlah 140 peristiwa, yang meliputi 52 orang laki-laki dan 84 perempuan, tanpa keterangan penyebab kematian. Kematian yang disebabkan karena sakit ini, terutama yang menimpa keluarga keluarga miskin yang oleh sebab kurangnya biaya untuk pemeliharaan kesehatan. Sementara mereka selama ini bekerja keras, terutama pekerjaan yang mengandalkan tenaga dan berada dalam lingkungan yang cenderung kurang sehat. Misalnya saja pekerjaan sebagai nelayan, di mana tuntutan kerja menggunakan tenaga yang besar, tetapi sekaligus juga berada di tengah laut dengan cuaca dan suhu yang sering kurang bersahabat dengan tubuh manusia.

Sementara penyebab lain dari perempuan menjadi kepala keluarga adalah akibat pecahnya keluarga karena suami dan istri bercerai. Secara kuantitatif, angka perceraian di Banyuwangi termasuk tertinggi di Indonesia, dan kecamatan paling tinggi angka perceraian di Banyuwangi adalah di Kecamatan Muncar. Tingginya angka tersebut selain karena jumlah penduduk dan angka perkawinan di Kecamatan Muncar juga tinggi, juga rasio perbandingan antara peristiwa perceraian dengan perkawinan cukup tinggi.

Tabel 1. Peristiwa Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk

Wilayah	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
Kecamatan Muncar	1.294	43	85	-
Kabupaten Banyuwangi	15.494	444	551	2

Sumber BPS Kabupaten Banyuwangi 2011

Berikut ini perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten

Banyuwangi dalam tahun 2010.

Tabel 2. Perkara Perceraian di PA Banyuwangi 2010

Perkara	Sisa th lalu	Diterima	Diputus
Cerai talak	573	2.023	2.082
Cerai gugat	972	3.443	3.423
Jumlah	1.545	5.466	5.505

Sumber : Laporan Tahunan PA Kabupaten Banyuwangi 2010

Dari data pengadilan agama tersebut dikaitkan dengan data perkawinan di Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 15.494 peristiwa, maka angka perceraian yang diputus oleh pengadilan agama sebanyak 5.505 perkara hampir sepertiga dari peristiwa perkawinan di Banyuwangi. Faktor penyebab perceraian berdasarkan data di atas, paling tinggi adalah adanya terjadinya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga, yakni disebabkan tidak adanya keharmonisan berkeluarga yang berjumlah 1.511 perkara. Penyebab berikutnya adalah masalah ekonomi sebanyak 1.213 perkara, dan tidak ada tanggung jawab sebanyak 1.109 perkara. Menurut staf di Pengadilan Agama Banyuwangi, dalam satu perkara perceraian bisa saja yang muncul beberapa faktor penyebab sekaligus. Dengan demikian antarfaktor bisa saling berkelindan mendorong terjadinya keputusan bagi suami istri untuk melakukan perceraian.

Tabel perkara perceraian di atas juga memperlihatkan bahwa jumlah cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif atau permohonan perceraian lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan. Cerai gugat, atau “cerai mancal” dalam istilah masyarakat Muncar, ini bisa berarti bahwa kesadaran hukum dan hak perempuan semakin meningkat, mudahnya akses dan proses pengurusan perkara perceraian, maupun rentannya ikatan perkawinan dalam keluarga. Namun juga, cerai gugat

ini dipergunakan untuk menyasiasi prosedur perceraian. Pengajuan cerai talak lebih rumit karena ada syarat-syarat seperti syarat *idah* dan syarat lainnya, sementara cerai gugat lebih mudah yang istilahnya tinggal beli surat saja. Oleh karena itu, meskipun yang menalak laki-laki, bisa diajukan oleh perempuan untuk memudahkan proses cerai.

Maraknya Tenaga Kerja Wanita (TKW) bekerja luar pulau maupun luar negeri juga memicu ketidakharmonisan keluarga yang dapat berujung pada perceraian. Banyak peristiwa perceraian terjadi setelah istri pergi bekerja dan berpisah dengan suami, akhirnya menyebabkan kurangnya komunikasi. Inisiatif perceraian dari perempuan ini juga disebabkan karena perempuan yang bekerja merasa memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan suaminya. Banyak terjadi kasus, di mana perempuan meminta cerai kepada suaminya, tetapi suaminya meminta sejumlah uang pada si istri sebagai kompensasi untuk menceraikannya. Atau si perempuan TKW sudah mempunyai calon pasangan lain yang berinisiatif memberi uang ke suami agar bersedia menceraikannya. Hal ini di masyarakat dikenal sebagai “talak tebus”, karena ada sistem tebusan agar terjadi perceraian. Dari beberapa kasus, kisaran uang tebusan untuk suami antara 15 juta sampai 25 juta, bahkan ada pula yang lebih. Talak tebus ini di masyarakat juga dikenal dengan istilah “nyusuki”.

Perkara cerai gugat yang disebabkan ekonomi banyak dilakukan oleh perempuan yang bekerja sebagai TKW. Perempuan yang bekerja di luar negeri atau di luar kota, setelah selesai urusan perceraian langsung kembali ke negara atau kota tempat mereka bekerja. Akibatnya, janda cerai gugat tidak lama berada di desanya. Sementara untuk mengurus anak-anak mereka, biasanya dititipkan pada orang tua untuk diasuh dan diawasi pendidikannya. Ada pula

yang mengajak anaknya untuk tinggal di kota tempatnya bekerja, bagi perempuan yang pekerjaannya masih di kota sekitar Banyuwangi.

Kondisi tersebut berbeda dengan Pekka yang dari kalangan miskin. Pekka yang secara ekonomi lemah yang disebabkan karena kematian ataupun perceraian, apabila si perempuan masih memiliki orang tua dan ia sendiri tidak mendapatkan hak tinggal di rumahnya, maka ia akan kembali ke rumah orang tuanya, atau kalau tidak ia akan tinggal bersama saudaranya. Sementara yang tidak memiliki orang tua, apabila ia memiliki rumah ia akan tinggal di rumahnya sendiri dan mendapatkan dukungan dari saudara-saudaranya dalam berbagai masalah keluarga terutama ekonomi.

Selain cerai talak dan cerai gugat, di masyarakat juga terjadi perceraian yang tidak jelas statusnya. Keluarga pecah akibat perpisahan antara suami dan istri tetapi tanpa melalui perceraian secara formal. Ada suami yang meninggalkan istrinya begitu saja tanpa kabar, dan ada pula suami yang melakukan kekerasan terhadap istri, sehingga istri memutuskan untuk tidak hidup bersama lagi. Namun, karena ketidaktahuan, dan terutama karena ketidakmampuan ekonomi untuk membayar biaya pengajuan cerai ke pengadilan agama, maka istri-istri tersebut tidak mengajukan gugatan cerai pada suami mereka. Akibatnya status mereka menjadi tidak pernah jelas, karena secara *de jure* mereka masih menjadi istri dari suaminya, tetapi secara *de facto* mereka telah berpisah.

Jumlah keluarga di Desa Tembokrejo secara administratif terlihat dalam data keluarga dalam bentuk kartu keluarga (KK). Desa Tembokrejo terdapat 8.261 keluarga. Keluarga-keluarga tersebut tidak hanya dikepalai oleh laki-laki, tetapi ada juga keluarga yang kepala keluarganya adalah perempuan. Data dari

Pemerintah Desa Tembokrejo, terdapat 7.847 kepala keluarga laki-laki, dan 414 kepala keluarga perempuan. Dengan demikian perempuan kepala keluarga di Tembokrejo ini mencapai 5,01% dari seluruh kepala keluarga di Tembokrejo.

Perempuan sebagai kepala keluarga sebenarnya menunjukkan fenomena gunung es. Hal ini karena data penduduk miskin dari Kecamatan Muncar menunjukkan jumlah yang lebih besar untuk keluarga yang kepala keluarganya perempuan dibanding data di atas. Data penduduk miskin di Desa Tembokrejo sebagai berikut :

Tabel 3. Penduduk Miskin Desa Tembokrejo Tahun 2009

Dukuh	Penduduk Miskin	Penduduk Miskin Pekka
Muncar Baru	1110	77
Palurejo	2111	247
Krajan	1386	152
Muncar	696	40
Jumlah	5303	516

Sumber : Pemerintah Desa Tembokrejo

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin perempuan yang menjadi kepala keluarga berjumlah 516 orang atau sekitar 9,7% dari 5.303 orang penduduk miskin yang terdata di Desa Tembokrejo. Padahal dalam fakta di lapangan juga terdapat perempuan kepala keluarga yang tidak masuk dalam kategori penduduk miskin.

Keluarga Pekka yang kategori prasejahtera dan sejahtera 1 ini sebagian tinggal dalam rumah yang sederhana. Mereka bekerja menjadi buruh di sektor industri, maupun sektor informal. Umumnya, keluarga yang kepala keluarganya perempuan ini akan memberdayakan seluruh atau sebagian anggota keluarganya untuk bersama-sama mendukung kebutuhan ekonomi dengan bekerja, kecuali anak-anak yang masih pada usia pendidikan dasar.

Hal tersebut mereka lakukan karena pekerjaan mereka kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena mereka umumnya sebagai buruh, pembantu rumah tangga, pembantu di warung, maupun pedagang kecil. Untuk itu, maka anak-anak yang dianggap sudah cukup dewasa akan dituntut pula untuk membantu ekonomi keluarga dengan bekerja.

Keadaan Pekka di wilayah Muncar ini nampaknya sejalan dengan hasil temuan Horton dan Hunt (1984: 281), bahwa sebagian besar keluarga dengan orang tua tunggal adalah miskin. Rendahnya pendapatan dan pendidikan akibat dari tidak lengkapnya kedua orang tua mereka. Sebuah studi longitudinal terhadap perempuan yang bercerai dan tidak menikah lagi menemukan bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan rata-rata sebesar 50%. Di antarakelompok rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan di bawah 25 tahun rata-rata hanya memperoleh pendapatan sebesar sepertiga dari pendapatan rumah tangga yang lengkap, sedangkan kepala rumah tangga perempuan yang berusia antara 25-44 tahun masih hanya mencapai 42% dari pendapatan rumah tangga yang lengkap.

## Pekka dalam Fungsi dan Peran Kepala Keluarga

### a. Mengatasi Masa Krisis

Hilangnya salah satu pilar utama keluarga, yakni suami atau ayah menyebabkan bangunan keluarga menjadi rapuh apabila tidak ada kemampuan beradaptasi dengan situasi kritis tersebut. Situasi paling kritis terjadi pada saat mulai terjadinya perpecahan dalam keluarga, baik ketika suami meninggal dunia atau ketika mulai proses perceraian. Kematian yang disebabkan oleh karena sakit yang lama sehingga mengganggu atau menghilangkan fungsi

suami sebagai kepala rumah tangga, maka krisis tersebut sebenarnya telah terjadi. Demikian pula pada saat terjadi pertentangan-pertentangan antara suami dan istri yang menjurus pada perpecahan, maka langsung berpengaruh terhadap berjalannya fungsi-fungsi dalam keluarga.

Pada beberapa keluarga Pekka yang ditinggal mati suami atau bapak, oleh karena telah didahului keadaan sakit, maka umumnya mereka telah menjadi siap. Keadaan yang berat bagi keluarga ini adalah bertambahnya beban keluarga yang disebabkan karena kebutuhan pengobatan, di samping bertambahnya beban ekonomi akibat suami tidak dapat bekerja secara produktif. Meninggalnya suami yang telah sakit, merupakan suatu kehilangan yang berat, tetapi pada umumnya perempuan dan keluarga telah siap dengan kondisi tersebut. Situasinya tentu akan berbeda dengan suami yang meninggal dunia secara mendadak. Istri dan anak akan merasa *shock* dan terpukul. Mereka butuh waktu untuk menerima keadaan tersebut. Namun, lambat laun mereka bisa menerima keadaan tersebut, terutama dengan dukungan dari keluarga dan lingkungan mereka.

Rasa berat dan *shock* juga dialami oleh perempuan yang bercerai, karena meskipun terjadi pertentangan tetapi umumnya pasangan berupaya menjaga agar tidak sampai pada perceraian. Perempuan yang bercerai pun akan merasakan perasaan berat terutama dalam menanggung beban ekonomi untuk menafkahi diri dan anak-anaknya. Bahkan pada saat proses perceraian terjadi, suami sudah tidak lagi menghiraukan istri dan keluarganya, apalagi memberi nafkah. Oleh karena itu, meskipun berat, perceraian tersebut dipandang sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana pula perceraian karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami akan

diterima sebagai upaya menuju hidup yang lebih baik. Tanpa keputusan untuk bercerai, posisi perempuan yang menjadi subordinat dari suami mereka sering diperlakukan sewenang-wenang dan dilecehkan sehingga perceraian membebaskan mereka dari ketakutan dan kekuatiran terhadap tindakan suami.

Kematian atau perceraian dapat menimbulkan krisis penghentian kepuasan seksual dari pasangan. Hal ini diakui terutama oleh perempuan yang bercerai pada usia yang masih muda. Perempuan yang setelah bercerai atau ditinggal mati suaminya berharap agar mereka mendapatkan ganti suami yang lebih baik, yang dapat membawa keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Namun demikian, ada juga perempuan yang setelah bercerai tetap bertahan untuk tidak menikah kembali. Bagi mereka ini, perempuan lebih kuat menahan nafsu birahi dibandingkan laki-laki. Mereka, yang karena umumnya telah memiliki anak-anak, lebih perhatian pada perkembangan anak.

Pada anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya, mereka juga merasakan kehilangan. Bagi anak-anak, dengan adanya sosok bapak mereka merasa keluarga tersebut terlindungi. Demikian pula terhadap kebutuhan kasih sayang bapak yang memiliki dimensi berbeda dengan kasih sayang dari ibu. Dengan perpisahan ini, maka seorang ibu dituntut pula untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih terhadap anak-anaknya untuk menutupi kekurangan tersebut. Namun seringkali waktu interaksi perempuan dengan anaknya berkurang karena kesibukan mencari nafkah.

#### *b. Mengatasi Masalah Ekonomi*

Masa transisi ini merupakan tahapan yang berat bagi istri untuk memulai hidup baru memegang seluruh peranan kepala keluarga. Keluarga Pekka

yang memiliki kemampuan ekonomi rendah, dan memiliki anak-anak di bawah umur, akan lebih terasa berat. Perempuan-perempuan tersebut yang sekarang mempunyai beban yang lebih berat untuk memperoleh nafkah, selain tetap bekerja pada pekerjaan lamanya, juga berupaya menambah dengan pekerjaan lain yang dapat menghasilkan pendapatan. Mereka kadang juga melakukan pekerjaan yang sama tetapi dengan alokasi waktu yang lebih lama untuk mendapatkan tambahan upah.

Takjarang, beberapa keluarga Pekka ini melakukan *sharing* pekerjaan dengan anak-anak mereka. Anak-anak akan mendapatkan bagian pekerjaan, terutama pekerjaan domestik atau rumah tangga sendiri membantu ibunya sambil tetap belajar dan bersekolah. Bahkan, ada pula yang anak-anak mereka dengan terpaksa membantu ibunya untuk melakukan pekerjaan produksi (pekerjaan yang menghasilkan upah) untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baik dengan tetap bersekolah ataupun bahkan ada yang terpaksa *drop out* dari sekolah. Hal ini akan berpengaruh terhadap kesempatan anak dalam belajar dan hak-hak anak lainnya dalam proses perkembangan kepribadiannya.

Keadaan keluarga yang pecah akibat kematian atau perceraian dengan suami menjadikan beban kebutuhan keluarga berada di pundak istri sepenuhnya. Pada perempuan yang ekonomi mampu, di mana pekerjaan awalnya hanya menjadi "sambilan" sekarang benar-benar menjadi utama bagi keluarga. Terlebih pada keluarga yang ekonomi lemah, pekerjaan istri yang memang sudah menjadi bagian dari penghasilan utama bersanding dengan penghasilan suami, maka setelah mengalami keluarga pecah menjadi satu-satunya sumber pendapatan keluarga.

Perempuan yang menjadi kepala keluarga semakin mempertegas posisinya sebagai pemeran ganda dalam peran

reproduksi sekaligus peran produksi. Hal ini menuntut pembagian tugas rumah tangga. Umumnya pemilihan aktivitas produksi dipertimbangkan dari aktivitas reproduksi, terutama bagi keluarga yang masih memiliki anak di bawah umur yang belum mandiri. Peran reproduksi bagi perempuan Jawa merupakan hal yang penting. Peran reproduksi ini tidak mesti terkait dengan tugas mengandung dan melahirkan, tetapi juga meliputi peran afeksi, kasih sayang, perhatian, dan pendidikan keluarga. Karena itu, alokasi kerja juga diseimbangkan dengan alokasi mengurus rumah tangga. Perempuan umumnya akan memilih pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan rumah tangga, pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan rumah tangga, pekerjaan yang dapat melibatkan anggota rumah tangga yang lain, atau pekerjaan yang penyelesaiannya tidak terikat waktu dan jam kerja sehingga bisa dikerjakan di sela-sela pekerjaan rumah tangga (Suratiah, 1996: 96-97).

### c. Melaksanakan Fungsi Pendidikan

Keluarga di mana perempuan menjadi kepala keluarga sering menimbulkan dilema. Di satu sisi, perempuan kepala keluarga juga dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang hanya dapat dilakukan dengan aktivitas produksi. Di sisi lain, ia harus mengelola rumah tangga dengan berbagai kegiatan domestik keluarga seperti memelihara rumah, memasak, mendampingi perkembangan anak, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka memilih pekerjaan produksi yang memungkinkan mereka tetap dapat menjalankan aktivitas domestik.

Namun terkadang tuntutan kebutuhan yang cukup besar menjadikan perhatian ke persoalan domestik dan peran reproduksi-afeksi lebih kecil daripada untuk aktivitas produksi. Hal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai pendidikan dan

keagamaan pada anggota keluarga. Pada akhirnya waktu untuk mendampingi anak-anak mereka dalam masa perkembangan sering kali tersita untuk bekerja. Terlebih pada keluarga yang lemah ekonominya, alokasi waktu bekerja mereka lebih besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Beberapa keluarga Pekka yang anak-anaknya cukup besar umumnya melakukan *sharing* pekerjaan. Hal ini pun akhirnya menyita waktu pendidikan anak. Pekerjaan domestik umumnya tidak terlalu mengganggu waktu belajar anak-anak. Namun, anak-anak yang terpaksa melakukan pekerjaan produksi pada akhirnya akan berhenti sekolah atau tidak melanjutkan guna membantu orang tua. Perempuan kepala keluarga sebenarnya menginginkan anak-anak mereka dapat melakukan pendidikan yang lebih baik dari mereka. Namun karena keterbatasan ekonomi yang menyebabkan Pekka tidak mampu membiayai sekolah anak-anak mereka. Ada pula yang karena keinginan sendiri, anak-anak Pekka tersebut memutuskan untuk keluar sekolah dan bekerja membantu kebutuhan keluarga.

Penanaman nilai-nilai sosial dan keagamaan bagi anak, selain diperoleh dari keluarga juga dari lembaga pendidikan di mana anak-anak Pekka tersebut belajar. Bahkan kecenderungan pada keluarga Pekka, yang oleh karena terbatasnya waktu mendampingi anak, menyandarkan urusan pendidikan tersebut pada lembaga pendidikan seperti sekolah dan Taman Pendidikan al-Quran (TPQ) yang ada di lingkungan mereka.

#### *d. Membangun Interaksi Sosial*

Untuk memelihara hubungan baik dengan tetangga, keluarga Pekka, sebagaimana keluarga-keluarga yang lain, saling menghormati dan membantu. Ruang interaksi antarwarga diantaranya adalah kegiatan-kegiatan keagamaan dan tradisi warga. Dalam kegiatan-kegiatan

kewargaan, keluarga Pekka juga berupaya untuk ikut berpartisipasi. Perempuan kepala keluarga ini dalam lingkungannya di Muncar yang tradisi keagamaannya kuat, juga turut aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti kegiatan jamaah pengajian untuk ibu-ibu. Umumnya kegiatan ini dilaksanakan sekali dalam seminggu. Selain kegiatan keagamaan, kegiatan kemasyarakatan lainnya juga menjadi ruang interaksi, seperti hajatan mantu, sunatan, dan sebagainya. Umumnya untuk pengajian slametan anak laki-laki mereka yang diikutkan. Meskipun demikian, perempuan juga ikut membantu penyelenggaraan acara terutama dalam penyediaan konsumsi kegiatan.

Interaksi sosial semacam ini bagi mereka cukup penting, yang mereka pandang sebagai kewajiban bermasyarakat. Bagi Pekka, hidup bermasyarakat harus mengikuti norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Mereka juga merasa bahwa tetangga-tetangga mereka sudah cukup baik dengan membantu mereka jika membutuhkan. Mereka merasa takut atau tidak nyaman jika mereka tidak menjalankan kelaziman yang dilakukan di masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh Pekka ini merupakan *social desirability*, di mana Pekka berupaya untuk memperoleh penerimaan di lingkungannya sesuai dengan tuntutan sosial atau *Social desirability*. Bagi Pekka, persetujuan dan penerimaan sosial (*social approval*) menjadi penting untuk memelihara kerukunan dan hubungan baik dengan lingkungannya. *Social desirability* juga dapat diartikan sebagai perilaku yang memiliki tujuan (*purposeful behavior*) dan memiliki konformitas yang tinggi terhadap stereotip yang berlaku di komunitas (Widhiarso, 2010). Dengan demikian, Pekka juga cenderung untuk mengikuti kepatutan yang berlaku dalam lingkungannya.

## Dukungan Lingkungan terhadap Pekka

Dalam masyarakat Jawa, di mana hubungan kekeluargaan, sanak sedulur, sangat kuat, berbagai persoalan yang dialami oleh satu keluarga akan didukung oleh keluarga-keluarga lainnya yang masih memiliki ikatan paseduluran. Bagi suatu keluarga besar, musibah yang menimpa anggota keluarga mereka merasa turut menanggung musibah. Oleh karena itu, mereka akan saling dukung dan membantu keluarga yang terkena musibah.

Pada keluarga pecah yang disebabkan perceraian, sementara keluarga tersebut belum memiliki rumah tinggal, maka perempuan yang bercerai dengan anaknya akan kembali ke rumah orang tuanya sendiri. Keberadaan keluarga Pekka di dalam keluarga orang tuanya kembali merupakan dukungan yang sangat besar bagi keluarga Pekka. Mereka yang kehilangan batu pijakan, emosi yang labil dan persoalan psikologis lainnya disebabkan ekses perceraian dapat terbantu dengan dukungan dari orang tua dan saudara-saudaranya. Hidup bersama orang tuanya, juga memberi dukungan terhadap kebutuhan ekonominya. Meskipun Pekka memiliki pekerjaan, tetapi hidup bersama orang tuanya menjadikan kebutuhan keluarga dapat ditanggung bersama.

Saudara-saudara Pekka, pada umumnya juga memberi perhatian kepada Pekka untuk mengatasi persoalan keluarganya. Saudara yang cukup mampu biasanya turut mendukung dengan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehari-hari. Bahkan termasuk kegiatan yang terkait dengan kemasyarakatan yang membutuhkan biaya atau tempat, umumnya saudara-saudaranya akan membantu, seperti untuk peringatan kematian atau giliran jamaah pengajian. Perhatian terhadap anak-anak Pekka juga cukup tinggi. Beberapa keluarga Pekka, anak-anak

mereka dibantu untuk pembiayaan pendidikannya oleh saudara mereka.

Masyarakat pedesaan sangat memegang prinsip kerukunan yang menjiwai hubungan di antara anggota masyarakatnya. Interaksi antarwarga bersifat horisontal dan banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan (paguyuban). Bahkan setiap pasangan interaksi dianggap sebagai anggota keluarga, atau yang disebut *sederek*. Oleh karena itu, dalam masyarakat pedesaan ditandai dengan ikatan perasaan batin yang sangat kuat sesama warga desa. Setiap orang merasa bagian dari masyarakatnya, dan sebagai sesama anggota masyarakat tersebut, maka muncul perasaan saling mengasihi, menghormati, dan saling menjaga.

Pada masyarakat Muncar nilai-nilai sosial dan nilai agama masih sangat kuat menjadi nilai-nilai bersama yang dihayati. Nilai-nilai tersebut mendorong masyarakat untuk saling membantu terutama pada kelompok yang lemah (*mustadzafin*). Keluarga yang diasuh oleh perempuan sebagai kepala keluarga dipandang sebagai kelompok *mustadzafin*. Hal ini mengingat bahwa anak-anak yang berada dalam keluarga Pekka, terutama yang ditinggal mati bapaknya, termasuk kategori anak yatim. Keluarga Pekka sendiri yang pada umumnya berada pada taraf ekonomi lemah, dengan sendirinya termasuk kategori miskin sehingga layak untuk mendapatkan dukungan dari lingkungannya.

Dukungan masyarakat terhadap Pekka di lingkungannya dapat berupa bantuan langsung yang bersifat konsumtif maupun produktif. Beberapa orang membantu memberikan uang belanja kepada keluarga Pekka untuk meringankan kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara yang lain, membantu dengan memberi peluang pekerjaan, baik di tempat usaha maupun untuk dikerjakan

di rumah sebagai pekerjaan tambahan yang menghasilkan pendapatan. Bahkan ada pula yang membantu dengan membiayai pendidikan anak keluarga Pekka. Berbagai bentuk dukungan ini sangat penting bagi Pekka dalam menjalani kehidupannya.

. Selama ini pemerintah masih kurang memperhatikan kondisi keluarga yang dipimpin oleh perempuan kepala keluarga ini. Pemerintah memiliki program-program bagi pemberdayaan keluarga miskin, tetapi tidak ada program yang secara khusus ditujukan pada perempuan kepala keluarga. Pemerintah desa memiliki program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang diantaranya kegiatan rehabilitasi perumahan bagi keluarga miskin dan pemberian bantuan modal usaha. Pemerintah setempat juga memiliki program bantuan sosial bagi masyarakat, seperti jaminan kesehatan masyarakat untuk warga miskin dan pembagian jatah beras untuk rakyat miskin. Berbagai program ini secara umum ditujukan pada warga miskin, tidak memandang keluarga yang utuh ataupun keluarga Pekka. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus malah keluarga Pekka tidak mendapatkan bantuan tersebut, baik kedua-duanya maupun salah satunya.

### **Refleksi atas Problem Struktural Pekka**

Keluarga sakinah yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana dalam UU perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Guna menciptakan keluarga yang bahagia dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, maka semestinya dimulai dari sejak awal perkawinan. Dengan demikian kesiapan mental dari pasangan calon pengantin yang akan memasuki jenjang perkawinan menjadi sangat penting untuk mewujudkan keluarga

sakinah. Di antaranya adalah pasangan suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Keluarga yang utuh dapat mengalami perpecahan, yang pada akhirnya menyebabkan seorang perempuan, atau istri menjadi kepala keluarga. Di wilayah Muncar faktor penyebab yang cukup besar adalah karena perceraian. Perceraian menunjukkan gagalnya pasangan membangun keluarga sakinah. Keluarga tidak berhasil membangun kehidupan yang harmonis, rukun, dan sejahtera, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri, agama, dan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kegagalan ini menjurus pada perselisihan dalam keluarga yang dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu faktor-faktor perceraian menjadi tantangan bagi upaya membangun keluarga sakinah.

Faktor internal yang menjadi problem perkawinan adalah adanya miskomunikasi antarpasangan. Antara suami dan istri kurang menjalin komunikasi yang intens dan intim. Kurangnya komunikasi ini terlebih pada keluarga yang saling berpisah jauh. Banyaknya keluarga yang salah satu pasangannya bekerja sebagai TKI di luar kota atau di luar negeri menjadi faktor pendorong terjadinya perceraian, karena antara suami dan istri tidak saling berkomunikasi dengan intens. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab perceraian ini. Kebutuhan keluarga yang semakin besar sementara pendapatan keluarga tidak cukup untuk menutup kebutuhan tersebut. Hal ini menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga. Masalah ekonomi ini pula yang mendorong banyak perempuan yang menjadi TKW, dan akibatnya hubungan dengan pasangan semakin jauh.

Namun demikian, faktor ekonomi dan juga adanya alat-alat teknologi dipandang bukan faktor penentu dari

ketahanan keluarga. Faktor yang paling utama adalah faktor agama. Hal ini karena untuk ekonomi, di Muncar banyak tersedia lapangan pekerjaan. Kalaupun masih kurang, bagaimana keluarga bisa menerima keadaan sambil tetap berikhtiar, maka pasti akan ada jalan keluar untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga. Demikian pula dengan teknologi informasi yang canggih mestinya malah bisa mempererat hubungan suami istri yang jauh. Hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa ada hal yang lebih mendasar dari sekedar persoalan ekonomi dan teknologi tersebut, yakni nilai-nilai moralitas agama.

Faktor-faktor tersebut juga diperburuk dengan kemudahan dalam pengurusan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pengurusan perkara perceraian dapat ditempuh langsung di PA tanpa melalui pemerintahan desa ataupun KUA, asalkan ada KTP dan Akta Nikah. Para berperkara baru ke pemerintah desa kalau tergugatnya, tidak diketahui alamatnya, atau ghaib. Tokoh agama menyayangkan keadaan sekarang, di mana PA dan Kemenag tidak lagi bersinergi, seperti waktu dulu Pengadilan Agama masih berada di naungan Departemen Agama atau Kementerian Agama. Pada saat PA dan Kemenag masih bersama, koordinasi dalam perkara perceraian sangat baik, terutama dengan melibatkan BP4 yang merupakan tokoh masyarakat dan kiai sehingga dapat mencegah perceraian yang tidak perlu. Perceraian di Pengadilan Agama melibatkan mediator, tetapi dari hakim, bukan dari BP4 sehingga memang sudah mengarah harus bercerai. Mestinya kalau melibatkan BP4, akan dapat mencegah perceraian.

Di Banyuwangi, khususnya kecamatan Muncar memang banyak terdapat tokoh agama dan pesantren,

tetapi masih kurang bersinergi untuk menekan peningkatan jumlah perceraian. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kegiatan majelis taklim, pengajian, majelis dzikir dan sebagainya cukup marak. Namun materi dalam kegiatan-kegiatan tersebut belum menyentuh persoalan yang dihadapi keluarga. Pada umumnya isi ceramah dalam kegiatan keagamaan hanya masalah ibadah, shalat, puasa, dan haji. Sementara masalah seperti kemiskinan, keluarga sakinah, ekonomi, dan sebagainya kurang mendapat perhatian.

## Penutup

Perempuan yang menjadi kepala keluarga berarti sepenuhnya memegang fungsi reproduksi dan produksi sekaligus dalam keluarga. Namun kenyataan, perempuan ternyata dengan keterbatasannya mampu menjalani hidup sebagai kepala keluarga. Berbagai persoalan seperti ekonomi dan pendidikan keluarga menjadi persoalan bagi perempuan kepala keluarga dalam membina keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga Pekka membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka disusun rekomendasi khususnya kepada Kementerian Agama, Cq. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

1. Terkait dengan meningkatnya trend perceraian, sebagai salah satu penyebab perempuan menjadi kepala rumah tangga, maka perlu:
  - a. Peningkatan kualitas penasehatan perkawinan, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pembinaan keluarga sakinah;

- b. Restrukturisasi keorganisasian BP4 agar struktur BP4 sampai di tingkat desa/kelurahan;
  - c. Berkoordinasi dengan Pengadilan Agama, agar persyaratan perceraian harus melewati konsultasi dengan BP4.
2. Perlu adanya program pembinaan keluarga sakinah yang secara khusus ditujukan pada perempuan kepala keluarga yang memiliki taraf ekonomi lemah melalui pendekatan ekonomi dan keagamaan yang saling integral.
  3. Perlu berkoordinasi dengan instansi pemerintah, baik pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas sosial, dan sebagainya untuk melakukan program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan pada kelompok perempuan kepala keluarga.
  4. Terkait dengan budaya dan nilai-nilai sosial yang sangat mendukung bagi perempuan kepala keluarga, maka perlu bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk menyosialisasikan dan penguatan budaya philantropi (kesetiakawanan), dan gerakan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf produktif bagi pengentasan kemiskinan, terutama pada keluarga Pekka.

### Daftar Pustaka

- Clark, M.H. 1986. *Woman-Headed Households and Poverty: Insights from Kenya*. In Barbara, C., Nancy C.M. Horstack Clare C. Novak and Myra H. Strobes (Eds.). *Women and Poverty*. Chicago: The University of Chicago Press
- Departemen Agama RI. 2007. *Membina Keluarga sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam RI
- Geertz, Hildred. 1985. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Press
- Gilbert, Alan dan Josef, Gugler. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Goode, William J. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hakim, Nurul. 2008. Konsep Keluarga Sakinah Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 10 TAHUN 1983. Dalam [www.badilagnet/data/artikel/2008](http://www.badilagnet/data/artikel/2008) diunduh 3 November 2011
- Harini, R. & Listyaningsih, U. 2001. Perubahan Strategi Bertahan Hidup Wanita Kepala Rumah Tangga di Masa Krisis: Studi Kasus Kecamatan Umbulharjo Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, Maret 2001, 47-62.
- Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L. 1984. *Sosiologi*, Edisi keenam. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ihromi, T.O. (ed). 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ihromi, T.O. (peny.). 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Kelurga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Istiadah. 1999. *Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga*. Jakarta: LKAJ
- Lubis, HM. Ridwan. 2005. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender dan Pembangunan* (terj.). Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center dan Pustaka Pelajar
- Muhammad, Husein. 2006. "Text and context the social construction of Syariah", Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional bertema Trends in Family Law Reform in Muslim Countries, Kuala Lumpur, 18-20 Maret 2006.
- Munir, Ahmad. 2009. *Kebangkitan Kaum Janda, Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Press Ponorogo
- Norma, Siti dan Sudarso. 2006. "Pranata keluarga", dalam: J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi* edisi Kedua. Jakarta: Kencana
- PEKKA. 2010. *Memperluas Jangkauan Memperluas Manfaat*. Laporan tahunan 2010. Jakarta: Sekretariat PEKKA
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Sajogyo, Pudjiwati. 1991. "Pendahuluan", dalam Gardiner, O.M. & Surbakti, S. (eds.). *Strategi Kehidupan Wanita Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: BPS.
- Sajogyo, Pudjiwati. 1985. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: Rajawali Press
- Suratih, Ken. Dkk. 1996. *Dilema Wanita antara Industri Rumah Tangga dan Aktivitas Domestik*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Susanto, Budi, SJ. Dkk. 1992. *Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)*. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino dan Penerbit Kanisius
- TEMPO Interaktif. 2010. 20 Persen Perempuan NTB Menjadi Kepala Rumah Tangga. Dalam <http://www.tempointeraktif.com> diunduh 28 Oktober 2011

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 9 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*. Dalam [www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id) diunduh 4 november 2011
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/191 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah
- Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan